



**SALINAN**

**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 42 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2010  
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI TENTARA NASIONAL INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menghadapi ancaman yang memiliki eskalasi tinggi dan dapat membahayakan ideologi Negara, kedaulatan Negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi segenap bangsa Indonesia, perlu membentuk komando operasi khusus Tentara Nasional Indonesia dari matra darat, laut, dan udara yang bercirikan kemampuan khusus dengan tingkat kecepatan gerak dan keberhasilan tinggi secara terintegrasi di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia;

- Mengingat :**
1. Pasal 4 ayat (1), Pasal 10, dan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Peraturan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

2. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 138);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI TENTARA NASIONAL INDONESIA.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 138), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) huruf d Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 12**

(1) Markas Besar TNI terdiri atas:

- a. unsur pimpinan: Panglima TNI.
- b. unsur pembantu pimpinan:
  1. Staf Umum TNI;
  2. Inspektorat Jenderal TNI;

3. Staf . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

3. Staf Ahli Panglima TNI;
  4. Staf Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum TNI;
  5. Staf Intelijen TNI;
  6. Staf Operasi TNI;
  7. Staf Personalia TNI;
  8. Staf Logistik TNI;
  9. Staf Teritorial TNI; dan
  10. Staf Komunikasi dan Elektronika TNI.
- c. unsur pelayanan:
1. Satuan Komunikasi dan Elektronika TNI;
  2. Pusat Pengendalian Operasi TNI;
  3. Sekretariat Umum TNI; dan
  4. Detasemen Markas Markas Besar TNI.
- d. Badan Pelaksana Pusat:
1. Sekolah Staf dan Komando TNI;
  2. Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI;
  3. Akademi TNI;
  4. Badan Intelijen Strategis TNI;
  5. Pasukan Pengamanan Presiden;
  6. Badan Pembinaan Hukum TNI;
  7. Pusat Penerangan TNI;
  8. Pusat Kesehatan TNI;
  9. Polisi Militer TNI;
  10. Badan Perbekalan TNI;
  11. Pusat Pembinaan Mental TNI;
  12. Pusat Keuangan TNI;
  13. Pusat Sejarah TNI;
  14. Pusat . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

14. Pusat Informasi dan Pengolahan Data TNI;
  15. Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian;
  16. Pusat Pengkajian Strategi TNI;
  17. Pusat Pengembangan Kepemimpinan TNI;
  18. Pusat Kerja Sama Internasional TNI;
  19. Pusat Jasmani dan Peraturan Militer Dasar TNI;
  20. Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana;
  21. Pasukan Pemukul Reaksi Cepat;
  22. Komando Garnisun Tetap;
  23. Satuan Siber TNI; dan
  24. Komando Operasi Khusus TNI.
- e. Komando Utama Operasi TNI:
1. Komando Pertahanan Udara Nasional;
  2. Komando Gabungan Wilayah Pertahanan;
  3. Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat;
  4. Komando Pasukan Khusus;
  5. Komando Daerah Militer;
  6. Komando Armada;
  7. Komando Lintas Laut Militer; dan
  8. Komando Operasional TNI Angkatan Udara.
- (2) Komando Utama Operasi sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 3 sampai dengan angka 8 merangkap dan berfungsi sebagai Komando Utama Pembinaan.

2. Di antara . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

2. Di antara Pasal 46A dan Pasal 47 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 46B sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 46B**

- (1) Komando Operasi Khusus Tentara Nasional Indonesia disebut Koopssus TNI bertugas menyelenggarakan operasi khusus dan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan operasi khusus yang membutuhkan kecepatan dan keberhasilan tinggi guna menyelamatkan kepentingan nasional di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.
  - (2) Koopssus TNI dipimpin oleh Komandan Koopssus TNI disebut Dankoopssus TNI yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI.
  - (3) Dankoopssus TNI dibantu oleh Wakil Komandan Koopssus TNI disebut Wadankoopssus TNI.
3. Ketentuan dalam Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

**Pasal II**

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Juli 2019  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

**JOKO WIDODO**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Juli 2019

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**YASONNA H. LAOLY**

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 123**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

Deputi Bidang Hukum dan Perundang-  
undangan,



*[Handwritten signature]*  
Silvanna Djaman



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 42 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN  
NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG SUSUNAN  
ORGANISASI TENTARA NASIONAL INDONESIA

**STRUKTUR KEPANGKATAN DAN JABATAN PERWIRA TINGGI  
DI LINGKUNGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA**

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>PANGKAT</b>
1	2	3
<b>MABES TNI</b>		
<b>UNSUR PIMPINAN</b>		
1.	Panglima TNI	Pati Bintang 4
<b>UNSUR PEMBANTU PIMPINAN</b>		
1.	Kasum TNI	Pati Bintang 3
2.	Irjen TNI	Pati Bintang 3
3.	Wairjen TNI	Pati Bintang 2
4.	Koorsahli Panglima TNI	Pati Bintang 2
5.	Sahli Panglima TNI Tingkat III	Pati Bintang 2
6.	Asisten Panglima TNI	Pati Bintang 2
7.	Inspektur Itjen TNI	Pati Bintang 1
8.	Sahli Panglima TNI Tingkat II	Pati Bintang 1

9. Wakil . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 2 -

NO	JABATAN	PANGKAT
1	2	3
9.	Wakil Asisten Panglima TNI	Pati Bintang 1
<b>UNSUR PELAYANAN</b>		
1.	Dansatkomlek TNI	Pati Bintang 1
2.	Kapusdalops TNI	Pati Bintang 1
3.	Kasetum TNI	Pati Bintang 1
4.	Dandenma Mabes TNI	Pati Bintang 1
<b>UNSUR BALAKPUS</b>		
1.	Dansesko TNI/Danjen Akademi TNI	Pati Bintang 3
2.	Kabais TNI/Dankodiklat TNI/Dankogartap/Wadan Sesko TNI/Wadanjen Akademi TNI/Dankoopssus TNI	Pati Bintang 2
3.	Kapuspen TNI/Kababinkum TNI/Kapuskes TNI/Danpaspampres/Dan POM TNI/Waka Bais TNI	Pati Bintang 2
4.	Wakapuspen TNI/Wakababinkum TNI/Wakapuskes TNI/Wadankodiklat TNI/Wadanpaspampres/Wadan POM TNI/Wadankoopssus TNI	Pati Bintang 1
5.	Kababek TNI/Kapusbintal TNI/Kapusku TNI/Kapusjarah TNI/Kapusinfoha TNI/Ka PMPP TNI/Kapusjianstra TNI/Kapuskersin TNI/Kapusjaspermildas TNI/Kaskogartap/Dansatsiber TNI	Pati Bintang 1

6. Inspektur . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 3 -

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>PANGKAT</b>
1	2	3
6.	Inspektur Kodiklat TNI/Danpus Kodiklat TNI/ Direktur (Sesko TNI, Bais TNI, Akademi TNI, Kodiklat TNI)/Dankorsis Sesko TNI/ Kordos Sesko TNI/Dansat Bais TNI	Pati Bintang 1
7.	Athan RI (Negara tertentu)/Penasehat PTRI di PBB	Pati Bintang 1
8.	Oditur TNI/Kapusmasmil	Pati Bintang 1
<b>KOTAMA OPS</b>		
1.	Pangkostrad	Pati Bintang 3
2.	Pangkohanudnas/Pangdam/Pangdivif/Danjen Kopassus/Pangkoarmada/Pangkolinlamil/ Pangkoopsau	Pati Bintang 2
3.	Kas Kostrad	Pati Bintang 2
4.	Irkostrad	Pati Bintang 1
5.	Kas Kohanudnas/Kasdam/Kasdivif/Wadanjen Kopassus/Kas Koarmada/Kas Kolinlamil/ Kas Koopsau	Pati Bintang 1
6.	Danrem Tipe A/Pangkosek Kohanudnas/ Danlantamal/Danguspurla/Danguskamla/ Danlanud Tipe-A	Pati Bintang 1
<b>MABES TNI ANGKATAN DARAT</b>		
<b>UNSUR PIMPINAN</b>		
1.	Kasad	Pati Bintang 4
2.	Wakasad	Pati Bintang 3

UNSUR . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 4 -

NO	JABATAN	PANGKAT
1	2	3
<b>UNSUR PEMBANTU PIMPINAN</b>		
1.	Irjenad	Pati Bintang 2
2.	Sahli Kasad	Pati Bintang 2/1
3.	Asisten Kasad	Pati Bintang 2
4.	Inspektur Itjenad	Pati Bintang 1
5.	Wakil Asisten Kasad	Pati Bintang 1
<b>UNSUR BALAKPUS</b>		
1.	Danpuspomad/Danpuspenerbad/Danpusterad/ Gubernur Akmil/Dansesko	Pati Bintang 2
2.	Kapuskesad	Pati Bintang 2
3.	Ka RSPAD Gatot Soebroto	Pati Bintang 2
4.	Danpusintelad/Direktur/Kadis/Dansecapad	Pati Bintang 1
5.	Wadanpuspomad/Wadanpuspenerbad/ Wadanpusterad/Wagub Akmil/Wadan Sesko	Pati Bintang 1
6.	Wakapuskesad	Pati Bintang 1
7.	Waka RSPAD Gatot Soebroto	Pati Bintang 1
8.	Ketua Komite Medik RSPAD Gatot Soebroto	Pati Bintang 1
<b>KOTAMA BIN</b>		
1.	Dankodiklatad	Pati Bintang 3
2.	Wadan Kodiklatad	Pati Bintang 2
3.	Danpussenif	Pati Bintang 2

4. Danpussenkav . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 5 -

NO	JABATAN	PANGKAT
1	2	3
4.	Danpussenkav/Danpussenarmed/ Danpussenarhanud	Pati Bintang 1
5.	Direktur/Inspektur Kodiklatad	Pati Bintang 1
6.	Wadan Pussenif	Pati Bintang 1
<b>MABES TNI ANGKATAN LAUT</b>		
<b>UNSUR PIMPINAN</b>		
1.	Kasal	Pati Bintang 4
2.	Wakasal	Pati Bintang 3
<b>UNSUR PEMBANTU PIMPINAN</b>		
1.	Irjenal	Pati Bintang 2
2.	Sahli Kasal	Pati Bintang 2/1
3.	Asisten Kasal	Pati Bintang 2
4.	Inspektur Itjenal	Pati Bintang 1
5.	Wakil Asisten Kasal	Pati Bintang 1
<b>BALAKPUS</b>		
1.	Danseskoal/Gubernur AAL	Pati Bintang 2
2.	Kadis/Ka Rumkital dr. Ramelan/Kaladogi	Pati Bintang 1
3.	Danpuspomal/Danpuspenerbal/Dan STTAL	Pati Bintang 1
4.	Wadan Seskoal/Wagub AAL	Pati Bintang 1
<b>KOTAMA BIN</b>		
1.	Dankodiklatal/Dankormar/Kapushidrosal	Pati Bintang 2

2. Wadan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 6 -

NO	JABATAN	PANGKAT
1	2	3
2.	Wadan Kodiklatal/Kas Kormar/Waka Pushidrosal	Pati Bintang 1
3.	Danpasmarm/Dankodikopsla	Pati Bintang 1
4.	Direktur Kodiklatal	Pati Bintang 1
<b>MABES TNI ANGKATAN UDARA</b>		
<b>UNSUR PIMPINAN</b>		
1.	Kasau	Pati Bintang 4
2.	Wakasau	Pati Bintang 3
<b>UNSUR PEMBANTU PIMPINAN</b>		
1.	Irjenau	Pati Bintang 2
2.	Sahli Kasau	Pati Bintang 2/1
3.	Asisten Kasau	Pati Bintang 2
4.	Inspektur Itjenau	Pati Bintang 1
5.	Wakil Asisten Kasau	Pati Bintang 1
<b>BALAKPUS</b>		
1.	Danseskoau/Gubernur AAU	Pati Bintang 2
2.	Kadis/Danpuspomau/Kalakespra "Saryanto"/ Karuspau "Dr. Suhardi Hardjolukito"	Pati Bintang 1
3.	Wadan Seskoau/Wagub AAU	Pati Bintang 1
<b>KOTAMA BIN</b>		
1.	Dankodiklatau/Dankorpaskhas/Dankoharmatau	Pati Bintang 2

2. Wadan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 7 -

NO	JABATAN	PANGKAT
1	2	3
2.	Wadan Kodiklatau/Wadan Korpaskhas/ Wadankoharmatau	Pati Bintang 1
3.	Direktur Kodiklatau	Pati Bintang 1
4.	Danlanud Pendidikan	Pati Bintang 1

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

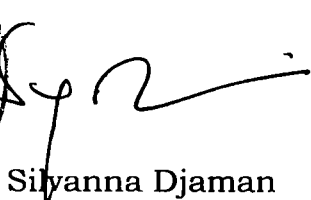
ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Ditulis Bidang Hukum dan Perundang-  
undangan,



  
Lydia Silvana Djaman